

# Mabes Polri Prioritaskan Pembentukan Polres Buteng

Peliput: Hengki TA



Lahan untuk Pendirian Polres Buteng ditinjau

LABUNGKARI, BP - Pembentukan Polres di Kabupaten Buton Tengah (Buteng) menjadi prioritas Mabes Polri. Hal tersebut disampaikan langsung Tim Staf Perencanaan Umum dan Anggaran (Srena) Mabes Polri, saat melaksanakan peninjauan lapangan studi kelayakan pembentukan Polres Buteng, di Kelurahan Bombonawulu, Kamis (23/09)

Ketua Tim Srena Mabes Polri, Brigjen Pol Budi Yuwono dalam sambutannya mengatakan, di Indonesia terdapat 26 Kabupaten/Kota yang belum memiliki Polres. Khususnya di Sulawesi Tenggara (Sultra), baru terdapat 12 Polres dan masih ada lima daerah lagi, salah satunya di Bu-

teng. "Di Sultra baru ada 12 Polres, untuk Buteng dan Kolaka Timur, akan di Prioritaskan tahun ini. Sementara tiga daerah lainnya, akan diusulkan pada tahun-tahun berikutnya," jelasnya. Lanjutnya, prioritas pembentukan Polres Buteng, setelah pihaknya melihat

kesiapan Pemerintah Daerah (Pemda) dan masyarakat, yang telah menghibahkan tanah seluas 10 hektar untuk Mabes Polri. Namun, pihaknya tidak bisa berjanji dengan percepatan pembentukan Polres Buteng, sebab Srena Mabes Polri

Lihat Hal 7....!

## Swab Antigen untuk Peserta CPNS di Buteng Gratis



Bupati Buteng, H Samahuddin SE didampingi Kepala Dinas Kesehatan saat menjelaskan Swab Antigen untuk Peserta CPNS Digratiskan

Peliput: Hengki TA

LABUNGKARI, BP - Pemerintah Kabupaten Buton Tengah (Buteng) menggratiskan pemeriksaan Swab Antigen untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Hal tersebut ditegaskan Bupati Buteng, H Samahuddin SE saat ditemui di depan kantor Bupati, Senin (27/09)

Dijelaskannya, pemeriksaan swab antigen secara

gratis itu, juga tidak hanya berlaku untuk warga dengan KTP Buteng. Namun, juga berlaku kepada warga luar daerah yang mengikuti tes CPNS di Kabupaten Buteng. "Swab antigen di Buteng Gratis, tidak ada bayar-bayar, selama untuk keperluan masyarakat dan kepentingan protokol kesehatan, maka pemerintah harus tu-

Lihat Hal 7....!

## Rencana Pinjaman Daerah Wajib Meminta Persetujuan DPRD Butur

Peliput : Kasrun

BURANGA, BP - Pinjaman daerah yang direncanakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Utara (Butur) harus mendapat persetujuan DPRD. Pinjaman itu, harus dibahas dalam sidang paripurna. Anggota DPRD Butur Rah-



Legislator PKB Butur Rahman

Lihat Hal 7....!

## Pemda Siapkan Anggaran Rp 5 Miliar untuk Bangun Kantor Polres Buteng



Polda Sultra didampingi Polres Baubau meninjau lahan untuk pendirian Polres Buteng

Peliput: Hengki TA

LABUNGKARI, BP - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Buton Tengah (Buteng), menyiapkan anggaran Rp 5 miliar untuk pembangunan kantor Polres Buteng, yang akan diban-

gun dipusat perkantoran, di Kelurahan Bombonawulu, Kecamatan GU. Hal tersebut, diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Buteng, H Kostantinus Bukide saat menyambut kedatangan Tim Staf Perencanaan Umum dan Anggaran

(Srena) Mabes Polri, yang melaksanakan peninjauan lapangan studi kelayakan pembentukan Polres Buteng, beberapa waktu lalu. Dijelaskannya, sejak Buteng mekar tujuh tahun lalu,

Lihat Hal 7....!

## Wakil Walikota Baubau La Ode Ahmad Moniani Ajak Emak-emak Ikut Lawan Narkoba



Wakil Walikota Baubau La Ode Ahmad Monianse terus serukan melawan Narkoba

Laporan: Prasetyo M

BAUBAU - Wakil Wali Kota Baubau La Ode Ahmad Monianse mengajak para ibu-ibu rumah tangga agar dapat berperan aktif dalam melawan Narkoba. Pasalnya, sebagai sosok yang

selalu dekat dengan anak, ibu-ibu rumah tangga juga merupakan tempat belajar yang pertama dan utama bagi anak-anaknya. Hal tersebut diungkapkan La Ode Ahmad Monianse melalui sambutannya saat menghadiri kegiatan so-

cialisasi bahaya Narkoba tingkat Kelurahan. Kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Baubau tersebut diselenggarakan di aula kantor Kelurahan Lanto Kota Baubau,

Lihat Hal 7....!

## PERCETAKAN FAREN GRAFIKA



PESANAN DICETAK DENGAN MESIN OFFSET HEIDELBERG HINGGGA UKURAN KERTAS A1 PLUS. Kalender, Brosur, dan Sticker minimal pesan 300 lembar untuk semua ukuran kertas.

Alamat Kantor: Jl Raya Palagimata, BTN Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau

## MENERIMA ORDERAN:

(1) KALENDER (2) BROSUR (3) KARTU NAMA (4) STICKER DAN SEJENISNYA

UNTUK PESANAN HUBUNGI:  
1. IPUL (HP: 082287693597)  
2. ARDI (HP: 081243148182)

## Bupati Busel Arusani Hibahkan Tanah Bangun Kantor KPU

Peliput : Amirul

**BATAUGA, BP - Bupati Kabupaten Buton Selatan H. La Ode Arusani menyerahkan surat hibah tanah seluas 50 meter (m) X 50 m untuk membangun kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Buton Selatan (Busel).**

Lokasi tanah tersebut berada di ibu kota Kabupaten Busel yakni Kecamatan Batauga, tepatnya di Kelurahan Laompo.

Penyerahan tersebut langsung diterima oleh Ketua KPU Propinsi Sultra Dr. La Ode Abdul Natsir didampingi ketua KPU Busel Ari Ashari Apriadi, S.IP diruang kerja Bupati Busel, Senin (27/9). Tampak sejumlah Kepala OPD hadir saat penyerahan surat hibah tanah tersebut.

Bupati Busel La Ode Arusani mengatakan penyerahan surat

hibah tanah untuk pembangunan kantor KPU Busel merupakan salah satu bentuk sinergitas antara pemerintah daerah dan pusat.

la menginginkan KPU Busel memiliki kantor yang representatif dan terintegrasi sehingga lebih mudah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," tuturnya.

"Saat ini KPU Busel masih mengontrak tempatnya kecil dan tidak ideal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," tuturnya.

la berharap setelah penyerahan surat

hibah tanah ini, kantor KPU Busel segera terbangun. Apalagi lokasi yang beriklan sangat strategis, yakni di kelurahan Laompo yang juga akan menjadi lokasi terbangun sejumlah perkantoran vertikal lainnya, yakni Bawaslu, Kejaksaan, Polres, Kantor Agama. Selain itu, lokasi tersebut menjadi lokasi pembangunan kantor Bupati dan Kantor DPRD Busel.

Sementara Ketua KPU Propinsi Sultra La Ode Abdul Natsir mengatakan bagi KPU setelah penyerahan

ini akan ditindaklanjuti untuk usulan ke KPU RI, untuk pembangunan kantornya.

"Setelah ini kita akan mengusulkan untuk pembangunan fisiknya ke KPU RI, setelah itu kita akan menunggu apakah pembangunannya nanti dianggarkan 2022 atau 2023," ucapnya.

Diketahui bahwa tugas-tugas KPU melayani kepentingan masyarakat terutama dalam persiapan pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada 2024. Dengan ini diupayakan KPU Busel akan memberikan pelayanan terbaik, karena kantor KPU Busel sekarang ini belum maksimal karena ruangannya serba terbatas.

"Atas nama KPU, kami mengucapkan apresiasi



Bupati Buton Selatan H. La Ode Arusani menyerahkan surat hibah tanah pembangunan Kantor KPU Busel ke Ketua KPU Sultra Dr. la Ode Abdul Natsir

kepada Pemda atas penyerahan hibah tanah untuk lokasi pembangu-

nan kantor KPU, KPU Busel lebih maju selangkah dari beberapa

daerah di Sultra yang sedang mengupayakan tanah," tukasnya. (\*)

## Sekda Buton Selatan Arusani Ingatkan Disiplin PNS



Laporan: Amirul

**BUSEL, BP - Pemerintah Kabupaten Buton Selatan menggelar rapat pembahasan disiplin pegawai sesuai aturan PP 94 Tahun 2021. Rapat pembahasan dilaksanakan di aula Kantor Bupati Buton Selatan, Selasa 28 September 2021.**

Rapat dipimpin Sekda Buton Selatan, Drs La Siambo, mewakili Bupati Buton Selatan, H. La Ode Arusani. Rapat diikuti se-

jumlah kepala OPD dan Kasubag Kepegawaian masing-masing instansi.

Dalam arahannya, Sekda Buton Selatan menyampaikan pesan Bapak Bupati untuk mengingatkan mengenai disiplin PNS. Dalam PP 94, Pasal 3 poin e dinyatakan, PNS wajib melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, serta Pasal 4 poin f dinyatakan PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.

Kata dia, terdapat sanksi yang akan diberlakukan terkait pelanggaran disiplin pegawai, mulai dari teguran lisan hingga yang paling berat yakni pemecatan.

Namun didalam memberikan sanksi terhadap pegawai yang kurang disiplin atau malas, bukan hanya berdasarkan dari satu sudut semata yakni daftar hadir. Tetapi penegakkan disiplin itu harus ada beberapa lampiran yang harus disertakan. "Sekurang-kurangnya

ada enam hal yang harus diperhatikan. Hal ini untuk mencegah adanya gugatan saat mengambil sebuah keputusan," katanya.

Diharapkan usai pembahasan ini terdapat sebuah kesepakatan dari seluruh PNS untuk dapat meningkatkan kedisiplinan dalam bekerja.

"Penegakkan kedisiplinan harus dimulai dari atas atau pimpinan OPD masing-masing sebagai contoh bagi bawahan," tandasnya. (\*)

## Asisten I Alimani Rotasi Empat Kepala Puskesmas di Buton

Peliput: Arianto W

**BUTON, BP -** Sebanyak empat Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di

Kabupaten Buton berganti pimpinan yakni Puskesmas Banabungi, Siontapina, Lawele, dan Tuangila.

Adapun nama-nama kepala puskesmas (Kapus) beserta jabatan barunya yaitu Sariawinda, A. Md. Keb., menjabat sebagai Kepala UPTD Puskesmas Banabungi. Emirah, SKM menjabat sebagai Kepala UPTD Puskesmas Siontapina. Muallimin Banisi, SKM menjabat sebagai Kepala UPTD Puskesmas Lawele. Nuriana, SKM menjabat sebagai Kepala UPTD Puskesmas Tuangila.

Demikian diungkapkan Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Buton Alimani yang juga selaku Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Buton, Rabu (22/09).

Dikatakannya, pergantian Kapus ini merupakan suatu penyegaran di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton.

"Rotasi ini adalah semata-mata se-



bagai bagian dari penyegaran di dalam pelaksanaan tugas," jelasnya.

Melalui rotasi jabatan ini, Alimani berharap agar dapat memberikan semangat baru bagi para pegawai dalam men-

jalankan Tupoksinya sebagai abdi negara.

"Diharapkan tentunya dengan penyegaran atau rotasi ini akan memberikan semangat baru dalam pengabdian, sekaligus memacu motivasi kerja,"

ujarnya.

Tak ayal, ia juga menegaskan kepada para tenaga kesehatan (Nakes) agar dapat bekerja secara profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab-

nya. "Saya menekankan kepada seluruh nakes, agar di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, benar-benar mencerminkan sebagai abdi negara," pungkasnya. (\*)

### BERITA KEHILANGAN

Telah Tercecer Sebuah STNK dan BPKB Mobil NISSAN EVALIA Warna Abu-abu dengan Nomor Polisi

"B 1245 FOV"

dengan Nomor Rangka

"MHBK1CG1FEJ020417"

dan nomor mesin :

"HR15720765T"

atas nama HARUN.

yang mana kedua dokumen tersebut hilang di Jl. Perintis, Kel. Katobengke Kec. Betoambari, Kota Baubau,

(hubungi: Dadan/085311294030)

# Gubernur Ali Mazi Tanggapi Sejumlah Isu yang Ditanyakan Fraksi di Parlemen

Laporan: Hasrin Ilmi

SULTRA, BP - Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi menanggapi sejumlah isu yang menjadi perhatian fraksi-fraksi di DPRD dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD, Senin (27 September 2021) malam.

Rapat yang mengagendakan penyampaian Jawaban Gubernur Sulawesi Tenggara Atas Pemandangan Umum Seluruh Fraksi Dprd Provinsi Sulawesi Tenggara Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2021, digelar secara maraton setelah sebelumnya fraksi-fraksi di DPRD menyampaikan pemandangan umumnya.

Salah satu isu penting yang dipertanyakan seluruh fraksi, terkait dengan penurunan beberapa item belanja, padahal secara umum perubahan belanja daerah mengalami peningkatan sebesar 0,02 persen.

Penurunan belanja antara lain pada belanja

pegawai. Hal ini terjadi setelah memperhitungkan secara riil seluruh kebutuhan gaji ASN dan Tambahan Tunjangan Penghasilan (TPP) sampai dengan 31 Desember 2021.

"Juga terdapat efisiensi belanja pada beberapa kegiatan antara lain pada kegiatan perjalanan dinas yang tidak dapat dilaksanakan akibat pemberlakuan PPKM dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Kegiatan-kegiatan tersebut pelaksanaannya lebih banyak dilakukan secara virtual," jelas Gubernur.

Isu berikutnya yakni penurunan belanja bantuan sosial. Fraksi di DPRD mempertanyakan hal itu mengingat bahwa di masa pandemic seharusnya bantuan sosial pemerintah meningkat.

Menurut Gubernur, penurunan pada belan-

ja bantuan sosial diakibatkan adanya penurunan jumlah usaha kecil menengah (UKM) dan koperasi penerima bantuan.

Kemudian, isu tentang kenaikan belanja barang dan jasa. Dijelaskan bahwa kenaikan ini disebabkan pemeliharaan aset pemerintah daerah, yaitu pemeliharaan jalan, jembatan, dan gedung pelayanan kesehatan yang berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan masyarakat akan fasilitas pelayanan pelayanan dasar.

Selain itu, juga dipertanyakan untuk mengkomodifikasi belanja-belanja yang sumber penerimaannya berasal dari dana transfer khusus yang dilaksanakan sesuai petunjuk teknis dari masing-masing kementerian yang membawahi.

Terkait beberapa pri-

oritas pembangunan sebagaimana pertanyaan yang disampaikan oleh Fraksi Gerindra yang menyoroti aspek pembangunan infrastruktur jalan, Gubernur menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, yang menjadi kewenangan provinsi tetap menjadi prioritas yang dilaksanakan secara bertahap oleh pemerintah daerah.

"Tidak hanya di wilayah kepulauan, namun menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah provinsi untuk dapat memberikan akses dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara," jelas Gubernur.

Kemudian, Fraksi PAN yang mempertanyakan tentang percepatan pemekaran Provinsi Kepulauan Buton, pemerintah provinsi tetap berkomitmen untuk mendukung pemekaran Provinsi Kepulauan Buton melalui upaya koordinasi dan konsultasi dengan



berbagai pihak agar pemekaran tersebut dapat segera terwujud. Tentunya, tegas Gubernur, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelumnya, Gubernur menyampaikan postur pendapatan daerah yang mengalami peningkatan sebesar 2,21 persen dari anggaran semula sebesar Rp 4,158 triliun menjadi Rp 4,250

triliun. Peningkatan tersebut bersumber dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer. Peningkatan komponen PAD sebesar 8,26 persen dihitung berdasarkan perkiraan riil realisasi penerimaan PAD yang telah diperkirakan sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi PAD sampai dengan September 2021 sebesar 70,42 persen, dengan rincian,

realisasi PKB 65,48 persen, BBNKB 65,30 persen, PBB-KB 74,42 persen, pajak air permukaan 2,96 persen, dan pajak rokok 80,31 persen.

Sedangkan retribusi daerah terealisasi 101,46 persen, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terealisasi 100,20 persen dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terealisasi 65,30 persen.\*\*\*

## Rangkaian Peringatan Harganas 2021, Sultra Borong Penghargaan



SULTRA, BP - Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) memborong penghargaan dalam rangkaian peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) Tahun 2021. Sekretaris Daerah Provinsi Sultra Nur Endang Abbas mewakili

Gubernur menerima penghargaan itu dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Kantor Gubernur Sultra yang digelar secara virtual, Senin (27 September 2021).

Ada tiga penghar-

gaan atas Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor yang diperoleh Sultra, yang semuanya meraih peringkat pertama. Tiga penghargaan tersebut yakni kategori Total Capaian Pelayanan KB Kelompok Provinsi dengan Tar-

get 10.000 60.000. Kedua, kategori Capaian KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) pada 1.500 Akseptor KB Tingkat Provinsi. Ketiga, kategori Capaian Implan Tingkat Provinsi.

Selain tiga penghargaan sebagai peringkat pertama, Sultra juga berhasil meraih peringkat ketiga atas capaian IUD (Intra Uterine Device) Tingkat Provinsi. Sementara di tingkat kabupaten, Konawe, berhasil meraih peringkat ketiga pada kategori Capaian Total Layanan Kab/Kota Kelompok II Target 500-1.500.

Seusai kegiatan, Sekda Sultra Nur Endang Abbas mengemu-

kakan, penghargaan yang diperoleh Sultra ini sangat istimewa. Sebelumnya, Sultra sama sekali belum pernah meraih penghargaan serupa.

Namun, dalam rangkaian peringatan Harganas Tahun 2021 ini, Sultra berhasil meraih peringkat pertama untuk tiga kategori sekaligus. Plus dua kategori sebagai peringkat ketiga tingkat provinsi dan kabupaten.

"BKKBN pusat memberikan penghargaan dan apresiasi kepada para pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang memberikan pelayanan terbaik sesuai kategori. Alhamdulillah, Harganas 2021,

Sultra yang selama ini belum pernah meraih peringkat satu, kini sekaligus meraih tiga kategori," jelas Sekda.

Sekda mengungkapkan, atas nama Gubernur Sultra, memberikan apresiasi kepada jajaran BKKBN Sultra dan kabupaten/kota, instansi KB, Tim Penggerak PKK yang merupakan mitra, dan seluruh kader yang ada di Sultra dari kecamatan hingga desa, yang telah berkolaborasi melakukan pendampingan, edukasi, penguatan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Lebih jauh dijelaskan, intervensi KB begitu penting dalam rangka

meningkatkan kualitas SDM, tidak sekadar kuantitasnya. Jarak kelahiran yang diatur dan ibu-ibu Indonesia yang sehat diharapkan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan menghasilkan SDM yang unggul.

"Karena itulah Program BKKBN ini kita kolaborasi dengan program penurunan stunting menjadi nilai tambah yang luar biasa untuk SDM Indonesia. Terima kasih kepada seluruh kader yang telah memberikan pelayanan terus-menerus, dengan kreatifitas dan inovasi dalam memberikan pelayanan," pungkas Sekda. (\*)

## Kemendagri Nilai Penataan Kelembagaan Pemerintah di Sultra Berkategori 'Sangat Tinggi'

Laporan: Ardi Toris

SULTRA, BP - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia memberikan penilaian dengan kategori 'sangat tinggi' dalam hal penataan kelembagaan pemerintah di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Hal itu mengemuka saat Gubernur Sultra Ali Mazi memberikan sambutannya dalam pembukaan Rapat Koordinasi Biro dan Bagian Organisasi Se-Sulawesi Tenggara yang digelar di Aula Bahteramas, Kantor Gubernur Sultra, Senin (27 September 2021).

Hadir dalam acara itu perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB),

yakni Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Erwan Agus Purwanto dan Deputi Pelayanan Publik Diah Natalisa.

"Saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas capaian penilaian dari Kemendagri dalam hal penataan kelembagaan dengan kategori 'sangat tinggi'. Ini adalah prestasi bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan pemerintah kabupaten/kota," kata Gubernur.

Prestasi ini, kata Gubernur, hendaknya dipertahankan bahkan harus terus ditingkatkan sebagai bentuk tanggung jawab kepada rakyat atas amanah yang dipercayakan.

Kerja keras tim kelembagaan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sehing-

ga meraih predikat tersebut bukan berarti sudah berhenti dengan keluarnya penilaian dari Kemendagri. Hal ini akan terus berlanjut seiring dengan adanya penyesuaian dengan aturan perundangan yang berlaku.

Gubernur juga menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan rakor bertema "Penguatan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, dan Reformasi Birokrasi dalam Mewujudkan Sulawesi Tenggara yang Aman, Sejahtera, dan Bermartabat", yang mana kegiatan ini belum pernah dilaksanakan sebelumnya.

"Hendaknya (rakor) dijadikan wadah untuk saling bertukar informasi dan saling memberi masukan positif dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, khususnya organisasi," tambah Gubernur.

Lebih jauh dijelaskan, berdasarkan Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 diharapkan terbentuk karakter birokrasi kelas dunia yang nantinya bisa menjawab tantangan di masa depan yang semakin kompleks.

Demi mewujudkannya, harus disiapkan ruang model organisasi yang mampu menyesuaikan diri dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan lingkungan global.

Biro dan Bagian Organisasi di lingkungan pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten/kota harus merumuskan deskripsi pembagian tugas bagi seluruh organisasi pemerintahan daerah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun

2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, ada delapan area perubahan yang harus dilaksanakan. Tiga di antaranya merupakan tugas utama dari Biro dan Bagian Organisasi yaitu, manajemen perubahan, penataan organisasi, penataan tata laksana serta penguatan akuntabilitas.

Pada area manajemen perubahan, diharapkan agar semua pemerintah kabupaten/kota telah menyusun dan menetapkan peraturan kepala daerah tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2019-2024. Ini merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 25 Tahun 2020.

Road map tersebut merupakan peta jalan tentang rencana dan strategi yang akan ditempuh untuk mewujudkan wajah birokrasi

si pemerintah daerah sampai dengan tahun 2024.

Manajemen perubahan yang direncanakan harus diterjemahkan serta ditindaklanjuti oleh seluruh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi, sehingga apa yang akan dilaksanakan sudah tertuang dalam rencana aksi reformasi birokrasi.

Pada aspek penataan organisasi, seluruh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota telah mengusulkan penyederhanaan birokrasi kepada pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Otomoni Daerah Kemendagri.

"Alhamdulillah, untuk Pemprov Sultra serta kabupaten/kota telah melaksanakan hal tersebut dan mendapatkan predikat 'sangat tinggi'. Penyeder-

hanaan birokrasi merupakan quick win mandatory dari pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2020," papar Gubernur.

Gubernur menegaskan, pembentukan organisasi pada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota harus memperhatikan efektif serta efisiensi. Apabila ada organisasi yang memiliki tugas dan fungsi yang sama harus dilakukan penataan untuk mendapatkan organisasi yang ideal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pada aspek tata laksana, perlu dipahami bahwa penataan tatalaksana merupakan hal fundamental untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses.\*\*\*

# Muscab PAFI Baubau ke II, Pimpinan Baru Harus Berperan Wujudkan Masyarakat yang Sehat

Peliput: Hengki TA

**BAUBAU, BP - Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) cabang Kota Baubau, menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) ke II, untuk melaksanakan pemilihan ketua cabang periode 2021-2026, yang digelar di salah satu Hotel di Kota Baubau, Minggu (26/09)**

Pada kegiatan tersebut, dihadiri dan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Baubau, Roni Muhtar. Dalam sambutannya, Jenderal PNS di Baubau itu mengharapkan, harus memilih pimpinan yang mempunyai visi misi, dalam memajukan sebuah roda organisasi.

"Pucuk pimpinan atau ketua organisasi itu, harus mempunyai karakter dan watak sebagai pimpinan," jelasnya.

Lanjutnya, pada masa pandemi saat ini, se-

bagai ketua PAFI, bisa mewujudkan masyarakat Kota Baubau yang sehat, dalam pola praktik-praktek hidup. Dimana, masyarakat dipastikan pola hidup konsumsi yang higienis.

"Disitulah peran PAFI, dalam melakukan pengkajian serta mengolah informasi dan data yang sesuai ke farmasiannya," tuturnya.

Sementara itu, Ketua PAFI Baubau periode 2016-2021, Hj Sitti Maolae mengungkapkan, sebagai seorang pemimpin dituntut sigap,

tulus melayani. Hadirnya PAFI cabang Baubau yang meliputi beberapa wilayah, yaitu Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, dan Buton Utara, merupakan wadah silaturahmi sesama tenaga teknis kefarmasian.

"PAFI merupakan organisasi yang menghimpun tenaga ahli ke farmasian profesi, yang biasa disebut Asisten Apoteker," ungkapnya.

Kemudian, ke farmasian saat ini bukan hanya pada penge-



Muscab PAFI

lolaan obat, namun sudah berkembang melakukan pelayanan ke farmasian yang komprehensif, bertujuan meningkatkan penggunaan obat yang rasional, dimana penggunaan obat dapat

meningkatkan kualitas hidup pasien. "Melalui organisasi ke profesi ini, ada aturan dan syarat, yang harus dimiliki sebagai tenaga teknis kefarmasian," bebernya. Harapannya, dengan

hadirnya PAFI pada tahun 2016 lalu, semoga kedepan dapat memberikan warna baru, ditengah problematika yang ada pada tenaga teknis farmasi yang ada di Kota Baubau. "Ini merupakan

langkah awal perubahan, membentuk wadah agar sesama anggota teknis kefarmasian, bisa bahu membahu dalam mencari solusi ditengah masalah yang terjadi," tutupnya. (\*)

## Sekda Baubau Roni Muhtar Kembali Melantik 129 Pejabat Eselon



Sekda Baubau Dr Roni Muhtar melakukan pelantikan eselon II

Laporan: Prasetyo M

**BAUBAU, BP -** Mewakili Wali Kota Baubau Dr. H. AS Tamrin, MH., Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Baubau Dr. Roni Muhtar, M.Pd. kembali melantik 129 Pejabat Eselon. Yang terdiri dari, Pejabat Eselon II 12 orang, Pejabat Eselon III 26 orang, dan Pejabat Eselon IV 91 orang.

Pelantikan sejumlah

Pejabat Eselon tersebut dilaksanakan di Bantea Umuri Bolu rumah jabatan Wali Kota Baubau, Senin (27/9/2021). Untuk pelantikan Pejabat Eselon II, selain karena perubahan nomenklatur, juga karena adanya pergeseran pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pejabat Eselon II yang dilantik tersebut di antaranya ialah, La Ode Darusalam,

S.Sos., M.Si. dilantik menjadi Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Selain itu, La Ode Aswad, S.Sos., M.Si. dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang sebelumnya menjabat sebagai kepala Bappeda.

Sementara itu, Drs. Ali Arham yang sebelumnya menjabat sebagai kepala Dinas Pariwisata dilantik menjadi Kepala Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana. Sedangkan Abdul Karim, S.Pd., M.Si. yang sebelumnya menjabat sebagai kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dilantik menjadi kepala Dinas Perhubungan.

Untuk kepala Dinas Pariwisata dijabat oleh H. Idrus Taufiq Saidi, S.Kom., M.Si. yang sebelumnya menjabat sebagai kepala Dinas Perhubungan. Sedangkan

kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dijabat oleh Drs. Rahmat Tuta, M.Si. yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten I Setda Kota Baubau.

Sedangkan yang menjabat sebagai Asisten I yakni Drs. MZ Tamsir Tamim, M.Si. yang sebelumnya menjabat sebagai Kadis Damkar dan Penyelamatan. Kemudian, Suar-mawati, S.Si., M.Si. dilantik sebagai Kadis PTSP dan Yuli Widiarti, ST, M.Si. dilantik sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Melalui sambutannya Dr. Roni Muhtar, M.Pd. mengungkapkan, pelantikan tersebut pada dasarnya adalah sebagai upaya dalam mengoptimalkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Baubau. Untuk itu pihaknya menekankan, agar para pejabat yang di-

lantik tersebut dapat bekerja dengan penuh optimisme, penuh semangat, penuh komitmen, dan integritas.

"Sebagaimana jabatan yang lama, yang selalu penuh optimisme, penuh semangat, penuh komitmen, dan integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas. Maka di jabatan yang baru pun, prinsip tersebut harus tetap dipegang teguh bahkan harus lebih ditingkatkan lagi. Sehingga, arah gerak langkah perubahan yang diharapkan oleh Kepala Daerah kita dapat terwujud," ujarnya.

Mantan kepala BKDD Kota Baubau ini menambahkan, pelantikan tersebut merupakan delegasi untuk menjalankan sebagian tanggung jawab jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Baubau. Hal ini karena dianggap mampu, untuk membantu mewujudkan

apa yang termuat dalam RPJMD Kota Baubau, yaitu menjadikan Baubau sebagai Kota yang Maju, Sejahtera, dan Berbudaya.

Sekda Kota Baubau ini juga menekankan, agar para pejabat yang baru dilantik tersebut dapat menjadi pionir serta teladan untuk selalu memberikan contoh dalam penerapan Protokol Kesehatan. Pasalnya, hingga saat ini, pandemi Covid-19 masih terus membayangi serta mengancam kehidupan seluruh masyarakat dunia pada umumnya dan Kota Baubau pada khususnya.

"Pada masa pandemi Covid-19 yang sampai saat ini belum berakhir, kita harus menjadi pionir dan teladan yang selalu memberikan contoh dalam penerapan Protokol Kesehatan. Sehingga apa pun jabatan kita, namun kita harus tetap menyampai-

kan kepada seluruh pegawai yang ada dalam OPD yang kita pimpin untuk tetap patuh pada Protokol Kesehatan," ungkapnya.

Dr. Roni Muhtar mengingatkan, agar dalam upaya kesuksesan program vaksinasi, seluruh kepala OPD terus menghimbau masyarakat. Selain itu, peran aktif dari seluruh masyarakat juga sangat diharapkan. Pasalnya, hanya dengan upaya-upaya tersebut, penyebaran Covid-19 di Kota Baubau dapat diminimalisir.

"Dengan kesadaran kita semua, Insya Allah kita bisa berharap, beberapa bulan yang akan datang masyarakat Baubau akan memiliki ketahanan tubuh. Kalau kita semua sudah memiliki anti bodi yang kuat, maka kita tidak perlu lagi menggunakan masker seperti dulu sebelum terjadinya pandemi Covid-19 ini," pungkasnya. (\*)

## Buka Turnamen Tenis Meja, Wawali Optimis Baubau Mampu Berkompetisi Pada Ajang Porprov Sultra 2022

Laporan: Prasetyo M

**BAUBAU, BP -** Wakil Wali Kota Baubau La Ode Ahmad Monianse optimis, Baubau mampu berkompetisi pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (PorProv) Sulawesi Tenggara (Sultra) Tahun 2022 mendatang. Hal ini diungkapkan melalui sambutannya saat membuka dengan resmi Lawa Bistro Open Turnamen Tenis Meja di Lawa Bistro, Ahad (26/9/2021).

"Melihat beberapa cabang olahraga di Kota Baubau yang semakin menunjukkan geliatnya akhir-akhir ini khususnya Tenis Meja. Saya optimis, Baubau mampu berkompetisi pada

ajang PorProv 2022 yang akan datang. Selain itu, Insya Allah kita juga telah siap untuk menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan PorProv ini," ujar La Ode Ahmad Monianse.

Mewakili Wali Kota Baubau Dr. H. AS Tamrin, MH., La Ode Ahmad Monianse berharap, dengan Lawa Bistro Open Turnamen Tenis Meja tersebut, Kota Baubau akan semakin memantapkan diri untuk menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan PorProv Sultra. Selain itu, juga dapat mencari pemain terbaik untuk mewakili Kota Baubau.

"Semoga dengan turnamen ini, olahraga Tenis meja di Kota Baubau khususnya dan di Kepulauan Buton

pada umumnya dapat menggeliat, dan menjadi cabang olah raga yang banyak diminati oleh para generasi muda kita sebagai generasi penerus. Mudah-mudahan akan muncul kembali kegairahan para Petenis Meja di Kota Baubau khususnya dan di jazirah Kepulauan Buton pada umumnya," harapnya.

La Ode Ahmad Monianse juga berharap, melalui turnamen tersebut, akan lahir para pemain-pemain Tenis Meja yang andal dan berprestasi sehingga bisa membanggakan daerah. Namun lebih dari itu pihaknya berharap, agar turnamen tersebut dapat menjadi jembatan untuk ajang silaturahmi serta untuk memperkuat barisan

dalam membangun Kepulauan Buton.

"Saya sangat berharap, agar turnamen ini bisa membangkitkan prestasi, namun lebih dari semua itu, kita sangat berharap, agar turnamen ini bisa menjadi jembatan untuk menjalin silaturahmi di antara kita. Karena untuk membangun kawasan Kepulauan Buton ini, kita membutuhkan kolaborasi dan kerja sama semua pihak," tuturnya.

Atas nama Pemerintah Kota Baubau, La Ode Ahmad Monianse juga memberikan apresiasi atas diselenggarakannya Lawa Bistro Turnamen tenis Meja tersebut. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan hal positif



Wakil Walikota Baubau La Ode Ahmad Monianse buka turnamen tenis meja

yang dilakukan oleh generasi muda yang mau berbuat dan berkarya sehingga menjadi inisiatif turnamen tersebut. "Mudah-mudahan dari cabang olahraga ini, kita

bisa merajut kembali semangat persaudaraan, agar kawasan ini bisa tumbuh menjadi sebuah kawasan sebagaimana yang kita cita-citakan bersama, yaitu men-

jadi Provinsi Kepulauan Buton. Karena hanya dengan semangat kebersamaan dan persaudaraanlah, apa yang kita cita-citakan bersama ini bisa ter," tutupnya. (\*)

## 3 Masukan Presiden Joko Widodo untuk Dunia dalam Mengatasi Pandemi COVID-19

**BOGOR - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Global COVID-19 Summit di sela-sela acara United Nation General Assembly atas undangan pribadi dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Jokowi memberikan tiga masukan untuk negara lain dalam mengatasi pandemi COVID-19.**

“Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi sebagai salah satu dari empat pimpinan di dunia yang dipilih secara pribadi oleh presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk memberikan masukan bagaimana kita bisa segera mengatasi pandemi COVID-19,” kata Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin usai acara Global COVID-19 Summit secara virtual, Rabu (22/9).

Ajakan dari Presiden Amerika tersebut disambut dengan baik oleh Presiden Joko Widodo. Menkes menjelaskan Presiden Indonesia menekankan yang pertama perlu segera dibangun adalah arsitektur sistem ketahanan Kesehatan Global yang baru. Karena sistem Kesehatan antar negara berhubungan erat, terutama di masa Pandemi ini.

“Dan kalau kita melihat bahwa di sistem

keuangan dunia sudah tertata secara global, arsitekturnya dengan baik, maka Indonesia merasa perlu membawa arsitektur sistem kesehatan global juga ditata dengan baik,” kata Menkes Budi.

hal yang kedua yang disampaikan Presiden Jokowi, lanjut Menkes, adalah bahwa perlu segera dibangun mekanisme global untuk sumber daya kesehatan yang bisa diakses oleh seluruh negara, terutama negara-negara berkembang dalam menghadapi krisis kesehatan. Sama seperti sistem ketahanan keuangan Global yang dibangun dalam bentuk mekanisme IMF yang tata kelolanya sudah jelas, partisipasinya pun juga jelas.

Hal tersebut sudah terbukti bisa menyelamatkan kondisi keuangan baik secara fiskal atau moneter di negara-negara berkembang.

“Indonesia merasa bahwa kita perlu membangun sistem support kesehatan secara global yang mirip dengan sistem support keuangan secara global seperti adanya IMF,” kata Menkes mengulangi ucapan Presiden Jokowi.

Masukan Ketiga yang disampaikan Presiden Jokowi adalah perlunya menyusun protokol kesehatan standar agar semua aktifitas global baik itu transportasi, pertemuan, atau acara-acara lainnya bisa mengikuti standar protokol yang sama.

Presiden Jokowi menganalogikan setiap orang tidak pernah pusing kalau masuk ke negara lain karena adanya paspor dan satu dokumen itu sudah sama di seluruh negara. Sebaliknya akan sulit melakukan perjalanan ke luar negeri jika paspor untuk masuk ke setiap negara berbeda-

beda.

“Sama juga dengan protokol kesehatan, kita harus standardisasi juga agar memudahkan gerakan dari seluruh orang ke seluruh negara di dunia,” ucap Menkes.

Ketiga masukan tersebut menjadi perhatian Presiden Jokowi mengingat Indonesia akan menjadi Presiden G20 tahun depan. Indonesia juga, kata Menkes Budi, berkomitmen siap menjadi salah satu Global Half Manufacturing dari vaksin MRNA yang nantinya akan sangat dibutuhkan untuk memvaksinasi jutaan orang di dunia.

“Indonesia juga menyatakan bahwa kita siap untuk menyusun arsitektur global sistem ketahanan kesehatan yang baru dan juga siap berkontribusi dan menyusun sistem keuangan yang bisa mensupport bila ada negara-negara berkembang yang mengalami masalah kesehatan,” tutur Menkes.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Amerika Serikat Joe



Biden menyampaikan beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemimpin dunia saat ini, yakni yang pertama adalah seluruh pimpinan dunia untuk segera memvaksinasi warganya secepat-cepatnya. WHO sendiri menargetkan tahun ini 40% dari populasi dunia bisa divaksinasi dan tahun depan 70% populasi dunia bisa divaksinasi.

Selanjutnya, ia menekankan untuk bertindak dengan segera untuk menyelamatkan jutaan nyawa umat manusia. Sudah 4,5 juta umat manusia di dunia wafat karena COV-

ID-19. Biden mengajak para pimpinan dunia agar bersama-sama bisa mempersiapkan seluruh alat kesehatan, obat-obatan, dan hal-hal lainnya yang dibutuhkan dalam menghadapi pandemi ini.

Selain itu, Biden juga menyampaikan setiap negara harus mempersiapkan diri untuk membangun masa depan yang lebih baik, mulai dari membangun arsitektur global ketahanan kesehatan dunia, dan mempersiapkan bagaimana pembiayaan kesehatan dunia bisa ditata dengan lebih baik. Sehingga kalau

ada negara di dunia yang mengalami masalah kesehatan bisa segera dibantu sama seperti kalau ada negara di dunia mengalami kesulitan keuangan bisa dibantu oleh badan internasional seperti IMF.

“Beliau juga menekankan bahwa untuk membangun masa depan yang lebih baik, lebih siap menghadapi pandemi berikutnya semua negara harus memiliki ketahanan kesehatan yang baik, bukan hanya negara maju tetapi juga negara-negara berkembang,” ucap Menkes. (\*)

## Tidak Ada Kaitan Vaksinasi COVID-19 Dengan Pecahnya Pembuluh Darah

**JAKARTA -** Direktur RS Pusat Otak Nasional, Mursyid Bustami memberikan penjelasan terkait disinformasi yang beredar bahwa vaksinasi COVID-19 menyebabkan efek samping serius yakni terjadinya pendarahan dalam tubuh.

Pihaknya menegaskan bahwa informasi tersebut tidaklah benar. Hingga kini, belum ada bukti ilmiah yang kuat dan valid yang

menunjukkan bahwa ada kaitan antara pemberian vaksinasi COVID-19 dengan terjadinya pecahnya pembuluh darah.

Kalaupun ada efek samping dari pemberian vaksinasi COVID-19, sifatnya masih sangat ringan dan mudah diatasi seperti demam, nyeri, mengantuk, lapar dll. Efek ini biasanya tidak berlangsung lama, maksimal 2 hari pasca penyuntikan vaksin.

“Terkait adanya info bahwa vaksin berisiko menyebabkan stroke pendarahan otak, kami klarifikasi bahwa secara ilmiah pun tidak ada hubungan antara stroke pendarahan dengan vaksin COVID-19,” katanya dalam Keterangan Pers Kementerian Kesehatan pada Jumat (24/9).

Mursyid menjabarkan bahwa sekitar 20% stroke pendarahan disebabkan karena adanya pe-

nyumbatan pada pembuluh darah dengan penyebab utamanya karena tingginya faktor risiko tertentu dan bukan disebabkan oleh vaksin COVID-19.

Adapun faktor risiko dari stroke dan menjadi common respecter diantaranya diabetes, hipertensi, pola makan yang buruk, merokok, obesitas, kurang aktivitas fisik, alkohol, dan narkoba.

“Kalau stroke pendarahan biasanya adalah penderita hipertensi. Yang terjadi adalah tidak kuatnya pembuluh darah menahan tekanan darah yang tinggi, sehingga terjadilah kebocoran,” ujarnya.

Diungkapkan Mursyid, sebenarnya faktor risiko ada 2 yakni yang bisa dikendalikan dan tidak bisa dikendalikan. Faktor risiko yang bisa dikendalikan sebaiknya dicegah sedini mungkin agar

tidak menjadi bom waktu kedepannya. Upaya pencegahan yang bisa dilakukan adalah mulai menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Tidak melakukan aktivitas yang dapat menimbulkan masalah kesehatan di masa depan seperti merokok, konsumsi minuman beralkohol, batasi konsumsi gula, garam dan lemak.

Sementara untuk faktor risiko yang tidak bisa dikendalikan yakni umur, genetik

jenis kelamin. Untuk mengetahuinya sebaiknya melakukan cek kesehatan secara berkala untuk mengetahui riwayat kesehatan sehingga apabila ada kelainan dalam tubuh bisa diketahui dan diantisipasi sedini mungkin.

“Untuk mengetahui itu, maka dilakukan pemeriksaan menyeluruh untuk mencari faktor risiko sehingga bisa kita kendalikan secepatnya,” terangnya. (kemkes.go.id)

Komentar Anda terkait isu berita yang kami kirim lewat akun resmi kami baik itu melalui **facebook, twitter, BBM**, dan melalui **SMS Publik** Akan kami publikasikan di **Harian Baubau Post**. Kami juga menerima tulisan opini yang ditulis dengan panjang maksimal 3 halaman kertas kuarto dan dikirim melalui **email** resmi kami, Hanya SMS yang di sertai dengan Nama dan alamat yang jelas akan kami muat dalam koran ini. Info selanjutnya hubungi **081243148182**.

Harian Pagi  
**Baubau Post**

Kritik, Lugas, Independen

Dalam pelaksanaan tugas, wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post

Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun saat melakukan tugas jurnalistik

Pemimpin Umum : Hasrin Ilmi  
Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi : Rahman Ismail  
Redpel : Prasetyo M  
Korlip : Zaman Adha  
Redaktur : Arianto W  
Reporter : Nelvida. A

Layouter : Hery Dr  
Halaq  
Pracetak : -  
Cetak : Ridwan  
Fakun

Penerbit : PT. Faren Grafika  
Komisaris : Ardi,S.Si,Apt  
Direktur Utama : Hasrin Ilmi  
Manager Keuangan : Andina Latief, SKM  
Manager Iklan dan Pemasaran : -  
Kepala Sirkulasi : -  
Administrasi : -  
Security : -

Kepala Biro Wakatobi : Zul Pisani  
Kepala Biro Buton Utara : Kasrun  
Kepala Biro Buton : -  
Kepala Biro Busel : Amirul  
Kepala Biro Buteng : Hengki TA  
Kepala Biro Bombana : -  
Kepala Biro Sultra : -

Kontributor Baubau : Iphul, Kontributor Sultra : Riswanati M,  
Kontributor Buton : Gustam, Kontributor Butur : Kasrun,  
Kontributor Buteng : Hengki TA, Kontributor Busel : Amirul

Baubau : Mahmud, La Ngaci  
Agen Pasarwajo : -  
Agen Butur : Kasrun

Harga Langganan : Dalam Kota Baubau Rp. 75.000,-/ bulan,  
Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim,  
Eceran Dalam Kota Baubau : Rp.4.000,-

Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl. Raya Palagimata, BTN Palagimata, Block L No. 1  
Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari Kota Baubau  
Tlp. 0402-2814207 - Email : [baubaupost2019@gmail.com](mailto:baubaupost2019@gmail.com)  
Percetakan : PT. Faren Grafika, Alamat: Jl. Bonekom No 3, Kel. Lipu,  
Kecamatan Betoambari, Kota Baubau

## Salah Cetak Brace Saat Liverpool Pesta Gol di kandang Porto

**JAKARTA -- Mohamed Salah mencetak dua gol atau brace saat Liverpool mencetak kemenangan besar 5-1 melawan Porto yang dililit krisis cedera guna merebut kendali Grup B Liga Champions, Rabu (29/9) dini hari WIB. Pertandingan yang sepertinya bakal sengit di atas kertas itu ternyata bisa dilalui dengan mudah oleh Liverpool.**



The Reds jauh lebih unggul di segala lini dalam laga di Estadio do Dragao. Pekerjaan tim asuhan Juergen Klopp makin mudah oleh penampilan menyedihkan dari kiper Porto Diogo Costa.

Porto mendapat pukulan sebelum kickoff ketika kapten dan bek tengah Pepe cedera saat pemanasan. Skuad tuan rumah makin timpang setelah gelandang Otavio hanya bertahan 13 menit sebelum tertatih-tatih keluar lapangan karena cedera hamstring. Liverpool tanpa am-

pun mengambil keuntungan ini. Salah mencetak gol setelah memanfaatkan kesalahan Costa pada menit ke-17. Liverpool mengundikan keunggulan itu sebelum turun minum ketika Sadio Mane mencetak gol dari jarak dekat setelah Costa kembali melakukan kesalahan.

Salah mengubah skor menjadi 3-0 pada menit ke-60 dengan penyelesaiannya rapi seperti biasanya. Porto sempat bangkit lewat gol sundulan Mehdi Taremi yang melewati Alisson.

Namun, harapan Porto untuk mengejar pupus ketika Costa melepaskan tendan-

gan ngawur dari gawangnya yang malah membuat pemain pengganti Roberto Firmino melepaskan tembakan ke gawang yang kosong. Kesengsaraan Porto belum usai manakala Firmino mencetak gol keduanya malam itu pada menit ke-81.

Hasil ini membuat

Liverpool memuncaki grup dengan mengumpulkan enam poin dari dua pertandingan dan berada di atas Atletico Madrid yang mengoleksi empat poin. Porto di posisi ketiga dengan nilai satu, sementara AC Milan berada di dasar klasemen dengan nirpoin. (REPUBLIKA.CO.ID)

## Mabes Polri Prioritaskan Pembentukan Polres Buteng

hanya sebatas mengusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB)

"Semoga tahun depan, usulan ini disetujui Kemenpan RB, sehingga melahirkan surat keputusan pembentukan Polres," tuturnya.

Selain itu, pihaknya juga telah mengadakan studi kelayakan serta mengumpulkan dokumen-dokumen administrasi pendukung untuk pembentukan Polres Buteng, yang kemudian di input untuk menjadi kajian tim srena di Jakarta.

Harapannya, pembentukan Polres Buteng kedepan, akan berdampak besar pada masyarakat, salah satunya dari segi pelayanan kepada masyarakat dan juga terkait Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).

"Tidak ada kemajuan tanpa diarah dengan kerja keras dan adanya

kerjasama, kekompakan, persatuan, serta saling bahu membahu antara Pemda, Polri dan TNI, termasuk masyarakat, tanpa itu tidak akan mungkin bisa diraih," harapnya.

Kedatangan Tim Studi Kelayakan Mabes Polri dipimpin Langsung Ketua Tim Staf Perencanaan Umum dan Anggaran (Srena)

Karo Remtala Srena Polri Brigjend Pol Budi Yuwono, Ps. Kabaglemwil Roremala Srena Polri Kombes Pol. Dra. A.A. Sagung Dian Kartini. Kaurmin Baglemwil Penata I Ahmad Bustomi. Pamin Baglemwil Penata Fajar Hendro Baskoro. Banum Baglemwil Pengda Pepen Supendi.

Serta ditemani Rombongan Tim dari Polda Sultra di Pimpin Karorena Polda Sultra Kombespol Dra. Yulia Agustin Sella Triana. dan Kapolres Baubau AKBP Zainal Rio Chandra Tangkari. (\*)

## Rencana Pinjaman Daerah Wajib Meminta Persetujuan DPRD Butur

man mengatakan, sampai saat ini anggota DPRD belum membahas rencana pinjaman itu dalam rapat paripurna.

"Belum ada surat masuk untuk pembahasan (dalam) paripurna. Kemarin (penyampaian) yang masuk itu pertama hanya pada saat RPJMD," kata Rahman melalui telepon selularnya, Senin 27 September 2021.

Rencana pinjaman daerah ini menjadi hangat diperbincangkan dikalangan anggota DPRD Butur maupun dikalangan masyarakat belakangan ini. Sebagian menilai, pinjaman itu tidak membutuhkan persetujuan DPRD, hanya sebatas penyampaian.

Mekanisme pinjaman daerah, lanjut Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, telah diatur sangat jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Utamanya pada pasal 16 yang mewajibkan persetujuan DPRD dalam pengajuan pinjaman.

"Kalau untuk mekanisme pinjaman itu tidak hanya ditetapkan begitu saja, tetapi berdasarkan data, berdasarkan hasil pemantauan dan penilaian BNN bersama Pemerintah Kota Baubau. Di mana, ada beberapa wilayah di Kota Baubau ini tingkat kerawanan Narkobanya begitu tinggi. Sehingga mendapatkan perhatian serius dengan ditetapkan sebagai Kelurahan Bersinar. Kelurahan Bersinar tersebut adalah Kelurahan Lanto, Kelura-

resmi. Utamanya menyangkut besaran pinjaman dan penggunaan pinjaman tersebut.

"Kita lihat dulu surat dari pemerintah. Apakah ini pinjaman jangka pendek, jangka menengah, atau pinjaman jangka panjang. Karena semua ada aturannya. Jangka pendek lain, jangka menengah dan jangka panjang juga lain," tuturnya.

"Jelasnya, mekanisme pinjaman itu, diusulkan oleh pemerintah dan dibahas dalam forum pembahasan APBD di DPRD. Yang pasti suratnya konfirmasi ke pimpinan DPRD," tambahnya.

Sejauh ini, lanjut Rahman, Fraksi Kebangkitan Bangsa belum pernah mengeluarkan keputusan soal pinjaman tersebut. Termasuk belum pernah melakukan pembahasan pinjaman dalam forum paripurna.

"Karena fraksi di DPRD itu harus dimintai persetujuan," ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Butur Ahmad Afif Darvin yang dikonfirmasi mengaku, DPRD belum pernah membahas rencana pinjaman daerah itu.

"Kita belum pernah mengagendakan pembahasan pinjaman itu. Saya belum pernah melihat suratnya seperti apa. Tidak tau kalau pimpinan yang lainnya," ujar Afif saat dikonfirmasi via telepon selularnya, Senin 27 September 2021.

Intinya, jelas Afif, setiap usulan pinjaman daerah wajib meminta persetujuan DPRD Butur. (\*)

## Swab Antigen untuk Peserta CPNS di Buteng Gratis

run tangan," jelasnya. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Buteng, Kasman mengatakan, stok swab antigen saat ini masih ada sekitar 2.000 unit lebih. Stok tersebut dinilai cukup bagi peserta CPNS

yang mencapai 1.457 orang. "Swab antigen untuk peserta CPNS, disalurkan di masing-masing Puskesmas, dengan tujuan untuk menghindari kerumuman dan untuk mendekatkan pelay-

anan kepada masyarakat," tuturnya.

Untuk diketahui, tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) akan digelar mulai 5 Oktober mendatang. Dalam pelaksanaan SKD nanti, juga akan disiapkan ruangan

khusus bagi peserta yang dinyatakan reaktif pada saat melakukan swab antigen.

Khususnya di Buteng, peserta yang akan ikut test SKD sebanyak 1443 orang. Dari seribu lebih peserta CPNS itu,

akan memperebutkan 69 formasi yang dibuka. Dengan adanya hal tersebut, maka BKSDM akan menyiapkan 100 unit komputer, dimana sebelumnya hanya akan menyiapkan 50 unit. (\*)

## Pemda Siapkan Anggaran Rp 5 Miliar untuk Bangun Kantor Polres Buteng

juga sudah menginginkan kehadiran Polres Buteng. Sehingga dengan hadirnya Tim Srena Mabes Polri, untuk melakukan studi kelayakan pembentukan Polres Buteng, mem-

bawa angin segar buat masyarakat maupun pemerintah

Bukti keinginan masyarakat dan pemerintah, terhadap pembentukan Polres Buteng, terlihat dari hibah lahan

seluas 10 hektar yang disertifikatkan atas nama Polres.

"Kami tengah menyiapkan anggaran sebesar Rp 5 miliar, untuk pembentukan kantor Polres Buteng," jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga sudah menyiapkan kantor sementara untuk Polres Buteng, hingga Rumah Jabatan (Rujab) Kapolres dan Waka-polres. Hal itu, merupakan wujud dan hara-

pan pemerintah serta masyarakat Buteng, untuk memiliki kantor Polres.

"Harapan kami, semoga waktu singkat Polres Buteng bisa terwujud," tutupnya. (\*)

## Wakil Walikota Baubau La Ode Ahmad Moniani Ajak Emak-emak Ikut Lawan Narkoba

Senin (27/9/2021).

"Kita membutuhkan perhatian dan kepedulian yang ekstra serta benteng yang kokoh agar generasi muda kita dapat terhindar dari paparan Narkoba ini. Dan benteng pertama dan terkuat adalah keluarga, yang dipelopori oleh para ibu-ibu rumah tangga sebagai guru pertama dan utama bagi anak-anaknya," ujar La Ode Ahmad Monianse.

Menurutnya, pada era digital seperti sekarang ini, pengedaran Narkoba bahkan sudah melalui jalur online dengan modus tertentu. Untuk itu pihaknya meng-

himbau, agar orang tua tidak lengah dengan memberikan kebebasan sepenuhnya kepada anak, terutama dalam penggunaan smartphone yang memiliki fitur-fitur canggih.

"Lawan kita itu adalah pengedar, di mana kita mempunyai satu sasaran yang sama, yaitu anak. Para pengedar ini akan berusaha untuk mempengaruhi anak-anak kita dengan iming-iming yang sangat menggairkan. Untuk itu, maka kita juga harus lebih kuat dalam memberikan pengaruh terhadap anak agar tidak terjerumus pada Narkoba ini,"

tuturnya.

La Ode Ahmad Monianse juga mengingatkan tentang pentingnya pemahaman terhadap jenis-jenis narkoba bagi ibu-ibu rumah tangga. Pasalnya, dengan perkembangan teknologi, banyak zat-zat yang semula tidak berbahaya kemudian diolah menjadi zat yang setara dengan Narkoba, seperti lem fox dan obat-obat generik lainnya yang ada di lingkungan keluarga.

"Kami bersama BNN saat ini begitu gencar mensosialisasikan agar masyarakat memiliki informasi tentang betapa

besarnya dampak dari Narkoba ini. Karena kami meyakini, dengan adanya pemahaman tentang bahaya Narkoba ini, maka akan lahir sebuah kekuatan untuk menjauhkan generasi muda kita dari paparan Narkoba ini," ungkapnya.

Lebih lanjut La ode Ahmad Monianse mengungkapkan, pihaknya bersama BNN Kota Baubau telah menetapkan lima Kelurahan sebagai Kelurahan Bersih Narkoba, atau disebut dengan istilah Kelurahan Bersinar. Kelurahan Bersinar tersebut adalah Kelurahan Lanto, Kelura-

han Wameo, Kelurahan Sulaa, Kelurahan Wale, dan Kelurahan Bukit Wolio Indah.

"Tentunya pilihan ini tidak hanya ditetapkan begitu saja, tetapi berdasarkan data, berdasarkan hasil pemantauan dan penilaian BNN bersama Pemerintah Kota Baubau. Di mana, ada beberapa wilayah di Kota Baubau ini tingkat kerawanan Narkobanya begitu tinggi. Sehingga mendapatkan perhatian serius dengan ditetapkan sebagai Kelurahan Bersinar. Kelurahan Bersinar tersebut adalah Kelurahan Lanto, Kelura-

# La Ode Arusani Tata Hunian di Kawasan Strategis



Perumahan Nelayan Desa Bahari, Sampolawa



Rumah Jabatan Bupati Busel

## Hadirkan Hunian Layak, Membangun Buton Selatan Menjadi Lebih Baik

Pemerintah Kabupaten Buton Selatan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah dan mendiami rumah yang tidak layak huni dengan berbagai program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya, melalui anggaran APBN, APBD Propinsi maupun APBD Buton Selatan.

Sejak 2017 hingga 2020 upaya pemerintah untuk mewujudkan hunian yang layak bagi masyarakat terus digalakkan. Tercatat dalam data Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat Buton Selatan (Busel) bantuan BSPS dari APBN dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebanyak 1471 unit, APBD Kabupaten 197 unit, APBD Propinsi sebanyak 57 unit, jadi total yang tidak layak huni menjadi hunian layak sebanyak 1.725 unit. Sementara rumah tidak layak huni di Buton Selatan sebanyak 4.945 unit, tentu masih tersisa 3.250 unit yang menjadi pekerjaan rumah Pemkab Busel.

Bupati Buton Selatan H. La Ode Arusani mengatakan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang didukung dengan infrastruktur yang baik merupakan bentuk kolaborasi yang tepat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lanjutnya, ditahun 2021 secara bertahap guna menuntaskan perbaikan rumah tidak layak huni tersebut, pemerintah daerah menggelontorkan anggaran APBD sebesar Rp 2,1 miliar dengan total rumah yang diperbaiki sebanyak 130 unit yang tersebar di enam kecamatan, Siompu, Siompu Barat, Kadatua, Sampolawa, Lapandewa dan Batauga.

Kegiatan perbaikan atau rehabilitasi rumah-rumah warga masyarakat yang mendiami rumah tidak layak huni untuk meningkatkan kualitas rumah-rumah tersebut sehingga layak untuk didiami.

"Kami tetap mendorong program pembangunan perumahan meskipun masih pandemi Covid-19 guna mendukung pemulihan perekonomian ditengah masyarakat kita," tutupnya.\*



Perumahan Nelayan Desa Bahari, Sampolawa



Bantuan Perumahan nelayan di Desa Bola, Kecamatan Batauga



Bantuan Perumahan nelayan di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa



Bupati Buton Selatan  
H La Ode Arusani

## Membangun Perumahan Nelayan di Kawasan Strategis

Selain itu program BSPS, pemerintah buton Selatan juga telah mengupayakan menghadirkan perumahan nelayan bagi masyarakat nelayan berpenghasilan rendah di Kecamatan Sampolawa, di Desa Bahari 50 unit dengan anggaran hingga Rp 8,2 miliar, sementara di Kecamatan Batauga di Desa Bola 46 unit dengan anggaran hingga Rp 5,7 miliar

Usai dibangun perumahan nelayan di kedua titik wilayah strategis Busel itu, pemerintah daerah mengkomplitkan sarana prasarana pendukungnya dengan membangun akses jalan masuk perumahan dengan jalan aspal, menyediakan jaringan listrik, serta jaringan air bersih.

Pembangunan rumah nelayan layak ini merupakan langkah strategis untuk menghindari perumahan kumuh bagi nelayan.\*



Pelabuhan Rakyat Bandar Batauga

## Program BSPS Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Ditahun 2021 program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS) melalui anggaran murni dari APBD Kabupaten Buton Selatan menggelontorkan anggaran Rp 2.1 miliar. Program ini Menyasar 130 unit rumah di enam kecamatan, yakni Siompu 30 unit, Siompu Barat 30 unit, Kadatua 10 unit, Sampolawa 20 unit, Lapandewa 20 unit dan Batauga 20 unit.

Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat Busel, LM. Martosiswoyo menjelaskan program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya tersebut, selain meningkatkan hunian masyarakat berpenghasilan rendah, juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi serta mengurangi tingkat pengangguran ditengah-tengah masyarakat. Apalagi kondisi saat ini masih dalam masa pandemik covid-19.

Lanjutnya, bantuan program BSPS itu setiap unit rumah mendapat bantuan dana sebesar Rp 17.500.000. Ia merinci anggaran material sebesar Rp 15.000.000 dan biaya tukang Rp 2.500.000, dengan memperdayakan warga sekitar. Jika setiap satu unit rumah dengan mempekerjakan tiga orang, maka dibutuhkan 390 orang membangun 130 unit rumah.

"Selain meningkatkan hunian rumah warga penerima bantuan, BSPS juga menciptakan lapangan kerja bagi warga sekitar," ucapnya.

Kata Martosiswoyo, BSPS sifatnya untuk Peningkatan Kualitas (PK) rumah, bukan pembangunan baru. Bangunan lama yang ditingkatkan kualitasnya dengan melihat kondisi lantai, dinding atau atapnya, tergantung kebutuhan yang ada di lapangan, makanya PK setiap unit rumah disetiap wilayah berbeda-beda, disesuaikan dengan kebutuhan apa yang diganti.

Lanjutnya, penggunaan APBD Kabupaten untuk program BSPS dari tahun 2017 hingga 2021 terus meningkat, awalnya hanya 25 unit dari APBD Kabupaten setiap tahun naik dibawah pimpinan H. La Ode Arusani terus meningkat hingga di 2021 menjadi 130 unit melalui anggaran APBD, artinya komitmen pemerintah daerah konsisten dalam percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakatnya.

Martosiswoyo mengaku telah mengupayakan untuk mendapatkan program BSPS melalui anggaran APBN dan APBD propinsi ditahun 2021 untuk Buton Swlatan, namun akibat pandemi covid-19, sebagian besar anggaran BSPS tersedot untuk penanganan covid-19.

Ia berharap kondisi pandemi covid-19 cepat berakhir, sehingga ditahun 2022 mendatang, bantuan BSPS melalui anggaran APBN, APBD propinsi maupun APBD kabupaten dapat tersalurkan lebih banyak untuk program BSPS.

Selain itu, program bantuan perumahan nelayan untuk di Desa Kaofe Kecamatan Kadatua sebanyak 50 unit juga dapat terealisasi.\*



Penyerahan BSPS secara simbolik pada penerima dari Bupati Buton Selatan H. La Ode Arusani



Peletakan batu pembangunan pelabuhan Fery Kadatua